

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025 - 2029**



Rencana Strategis RENSTRA

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



2025 - 2029

DAFTAR ISI

Daftar isi	i	
Daftar Tabel	ii	
Daftar Gambar	ii	
Kata Pengantar	iii	
BAB. I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH	9
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah	9
2.2	Sumber Daya Sekretariat Daerah	12
2.3	Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	19
2.4	Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	20
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH	29
3.1	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah	29
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	31
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	33
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5	Isu-isu Strategis	40
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	43
4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	43
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH SERTA PENDANAAN	47
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagunya	47
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
7.1	Target Keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah; dan	54
7.2	Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).	61
BAB VIII	PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai di Lingkup Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan	13
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai di Lingkup Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	14
Tabel 2.4	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2025	20
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah	25
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan	26
Tabel 3.1	Sinkronisasi Isu Strategis Nasional, Propinsi Sumatera Barat dan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	34
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029	44
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan	46
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan	49
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	54
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	11
Gambar 2	Struktur Organisasi Asisten I	11
Gambar 3	Struktur Organisasi Asisten II	12
Gambar 4	Struktur Organisasi Asisten III	12

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 - 2029. Dalam rangka mengemban visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 5 tahun ke depan, yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dan masyarakat guna pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai instansi yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dituntut untuk dapat melakukan perubahan secara proaktif kearah perbaikan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini maka Sekretariat Daerah mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan kedepan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kinerja, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pengendalian kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah, Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya Renstra ini, akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu 2025-2029. Sehingga target yang telah dirumuskan dan disepakati dapat tercapai selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Painan,

2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



MAWARDI ROSKA, S.IP

Pembina Utama Madya - IV/d
NIP. 19670907 198902 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelimpahan kewenangan otonomi kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih baik dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunannya. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah perlu adanya suatu sistem yang terencana dan berkesinambungan serta berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan dan terencana melalui proses perubahan untuk mewujudkan kondisi ideal. Proses-proses tersebut merupakan tahapan pembangunan yang merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing. Untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi secara optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan juga instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan proses pembangunan yang berkelanjutan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan wajib menyusun dan menetapkan arah kebijakan dan tujuan selama 5 (lima) tahun ke depan yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Perencanaan strategis yang

dibuat merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*output*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah minimal memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah baik dengan Peraturan Kepala Daerah maupun Peraturan Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk :

- 1) Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dalam RPJMD dan Penetapan Indikator RPJMD yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 2) Disusun sebagai acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kerja tiap tahunnya.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah.
- 2) Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistim pemerintahan daerah dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.
- 3) Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Adanya kontribusi Sekretariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen Rencana Stategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 terdiri dari 8 (delapan) bab atau bagian, dengan berpedoman kepada Ranperbup Renstra 2025-2029, yaitu :

Bab I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai :

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memuat penjelasan tentang

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah.

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai

3.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan visi, misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota

3.4. Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam lima tahun mendatang,

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan Renstra, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindaklanjut

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah

Struktur Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2.1.1. Tugas

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

2.1.2. Fungsi

Untuk menunjang tugas pokok, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi berdasarkan Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada struktur organisasi, maka pelaksanaan tugas pokok tersebut dilaksanakan oleh Bagian-bagian yang dikelompokkan menjadi tiga (3) Asisten yaitu :

- a. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** yang membawahi Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan** yang membawahi Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam.
- c. Asisten Administrasi Umum** yang membawahi Bagian Organisasi, Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Perencanaan Keuangan.

2.1.3. Struktur Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Sekretaris Daerah dibantu tiga Asisten yaitu: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum. Masing masing asisten membawahi bagian-bagian sebagaimana tergambar dalam bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah yang dibagi menurut Asisten Masing-masing. Bagian-bagian yang berada di Sekretariat Daerah:

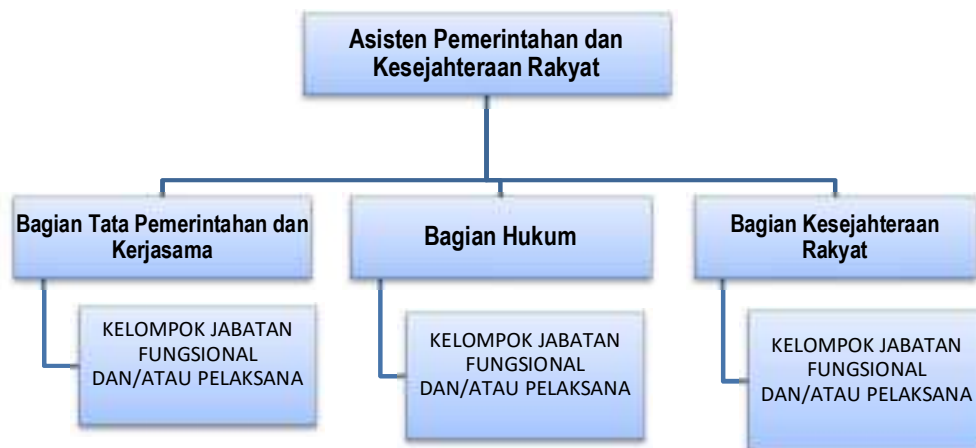
- a. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- c. Bagian Hukum
- d. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- e. Bagian Administrasi Pembangunan
- f. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- g. Bagian Umum
- h. Bagian Organisasi
- i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

j. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Gambar 1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



Gambar 2
Struktur Organisasi Asisten I



Gambar 3
Struktur Organisasi Asisten II



Gambar 4
Struktur Organisasi Asisten III



2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sumber daya manusia di Sekretariat Daerah cukup memadai. Namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok sebagai koordinator, perumus kebijakan, dan pelaksana pengendalian pembangunan.

Kondisi Kepegawaian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada awal 2025 sebanyak 97 (Sembilan puluh

tujuh) orang, dengan rincian dapat dilihat dari berbagai pendekatan sebagaimana tergambar dalam table-tabel berikut antara lain :

TABEL 2.1
JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH
BERDASARKAN GOLONGAN

No	UNIT KERJA	JML						Jumlah
		Non PNS	PPPK	I	II	III	IV	
1.	Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten			-	-	-	8	8
2.	Bag. Tata Pemerintahan dan Kerjasama	2		-	-	3	2	5
3.	Bag. Kesra	2	1	-	-	4	2	6
4.	Bag. Hukum	1		-	-	5	2	7
5.	Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	3	1	-	1	1	2	4
6.	Bag. Administrasi Pembangunan			-	1	5	3	9
7.	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	2	2	-	1	15	1	17
8.	Bag. Umum	31	8	-	6	8	1	15
9.	Bag. Organisasi	1		-	1	6	1	8
10.	Bagian Perencanaan dan Keuangan			-		10	1	11
11.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3	2	-	3	3	1	7
JUMLAH		45	14	0	13	60	24	97

TABEL 2.2
JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
BERDASARKAN PENDIDIKAN

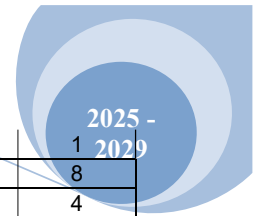
No	UNIT KERJA	TK. PENDIDIKAN						JUMLAH
		DASAR	SMP	SMA	D3	S I	S II	
1.	Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten	-	-	-	-	1	7	8
2.	Bag. Tata Pemerintahan dan Kerjasama	-	-	-	-	3	2	5
3.	Bag. Kesra	-	-	-	-	3	3	6
4.	Bag. Hukum	-	-	-	-	5	2	7
5.	Bag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	1	-	1	2	4
6.	Bag. Administrasi Pembangunan	-	-	1	1	3	4	9
7.	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	2	12	3	17
8.	Bag. Umum	-	-	7	1	5	2	15
9.	Bag. Organisasi	-	-	1	-	4	3	8
10.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	1	1	7	2	11
11.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	1	1	2	3	7
JUMLAH		0	0	12	6	46	33	97

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2025 untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sarana dan Prasarana sebagai berikut :

TABEL 2.3
SARANA DAN PRASARANA SEKRETARIAT DAERAH

Kode Barang						Nama Barang	Jumlah
1						2	3
1						ASET	2.489
1	3					ASET TETAP	2.489
1	3	2				PERALATAN DAN MESIN	2.489
1	3	2	01			ALAT BESAR	27
1	3	2	01	03		ALAT BANTU	27
1	3	2	01	03	05	POMPA	27
1	3	2	02			ALAT ANGKUTAN	80
1	3	2	02	01		ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	75
1	3	2	02	01	02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	28
1	3	2	02	01	04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	47
1	3	2	02	02		ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	5
1	3	2	02	02	01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1
1	3	2	02	02	02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	4
1	3	2	03			ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	5
1	3	2	03	03		ALAT UKUR	5
1	3	2	03	03	01	ALAT UKUR UNIVERSAL	5
1	3	2	04			ALAT PERTANIAN	21
1	3	2	04	01		ALAT PENGOLAHAN	21
1	3	2	04	01	04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	21
1	3	2	05			ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.981
1	3	2	05	01		ALAT KANTOR	382
1	3	2	05	01	01	MESIN KETIK	1
1	3	2	05	01	02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	1
1	3	2	05	01	03	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	1
1	3	2	05	01	04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	137
1	3	2	05	01	05	ALAT KANTOR LAINNYA	242
1	3	2	05	02		ALAT RUMAH TANGGA	1.552
1	3	2	05	02	01	MEUBELAIR	545
1	3	2	05	02	02	ALAT PENGUKUR WAKTU	5
1	3	2	05	02	03	ALAT PEMBERSIH	19
1	3	2	05	02	04	ALAT PENDINGIN	189
1	3	2	05	02	05	ALAT DAPUR	303
1	3	2	05	02	06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	478
1	3	2	05	02	07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	13
1	3	2	05	03		MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	47
1	3	2	05	03	01	MEJA KERJA PEJABAT	2
1	3	2	05	03	02	MEJA RAPAT PEJABAT	4
1	3	2	05	03	03	KURSI KERJA PEJABAT	20
1	3	2	05	03	07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	21
1	3	2	06			ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	65
1	3	2	06	01		ALAT STUDIO	57
1	3	2	06	01	01	PERALATAN STUDIO AUDIO	33
1	3	2	06	01	02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	24
1	3	2	06	02		ALAT KOMUNIKASI	8
1	3	2	06	02	01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	5
1	3	2	06	02	06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	2



1	3	2	06	02	07	ALAT-ALAT SANDI	1
1	3	2	07			ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	8
1	3	2	07	01		ALAT KEDOKTERAN	4
1	3	2	07	01	01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	1
1	3	2	07	01	21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	3
1	3	2	07	02		ALAT KESEHATAN UMUM	4
1	3	2	07	02	04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	4
1	3	2	08			ALAT LABORATORIUM	65
1	3	2	08	01		UNIT ALAT LABORATORIUM	20
1	3	2	08	01	12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	14
1	3	2	08	01	18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	5
1	3	2	08	01	41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	1
1	3	2	08	03		ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	11
1	3	2	08	03	10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	2
1	3	2	08	03	11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	8
1	3	2	08	03	12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	1
1	3	2	08	04		ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	34
1	3	2	08	04	05	SYSTEM/POWER SUPPLY	34
1	3	2	09			ALAT PERSENJATAAN	2
1	3	2	09	02		PERSENJATAAN NON SENJATA API	2
1	3	2	09	02	01	ALAT KEAMANAN	2
1	3	2	10			KOMPUTER	233
1	3	2	10	01		KOMPUTER UNIT	114
1	3	2	10	01	01	KOMPUTER JARINGAN	1
1	3	2	10	01	02	PERSONAL KOMPUTER	113
1	3	2	10	02		PERALATAN KOMPUTER	119
1	3	2	10	02	01	PERALATAN MAINFRAME	3
1	3	2	10	02	02	PERALATAN MINI KOMPUTER	2
1	3	2	10	02	03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	89
1	3	2	10	02	04	PERALATAN JARINGAN	25
1	3	2	18			RAMBU - RAMBU	1
1	3	2	18	01		RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1
1	3	2	18	01	02	RAMBU TIDAK BERSUAR	1
1	3	2	19			PERALATAN OLAH RAGA	1
1	3	2	19	01		PERALATAN OLAH RAGA	1
1	3	2	19	01	03	PERALATAN SENAM	1

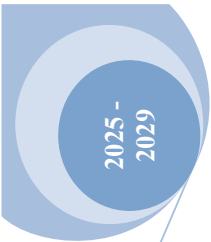
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.

Terlaksanakannya tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan diperlukan pegawai yang memiliki kompetensi dan berdisiplin dengan disertai pula adanya peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya aparaturnya.

Kompetensi yang dimaksud adalah berkenaan dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan, meningkatkan mutu dan kapasitas sumber daya aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sangatlah penting dilakukan, mengingat dalam era otonomi daerah sekarang ini menuntut akan profesionalisme pegawai dalam memahami isu

strategis untuk dapat merumuskan kebijakan yang sinergis, seiring dengan semakin meningkatnya Sumber Daya masyarakat yang tentunya akan berdampak pada tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan itupun tergantung juga pada sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2021 - 2026 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2021-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel berikut:



TABEL 2.4
REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Sekretariat Daerah		(4)	(5)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
2	Ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Sekretariat Daerah						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
3	Penguatan Nilai SAKIP pada Komponen Pelaporan Kinerja						12	13	14	15	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	90%	90%	90%	
4	Kontribusi peningkatan nilai RB pada 8 area perubahan						6 Area						100%						100%			
5	Persentase Penataan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH 2025-2029

2025 -
2029

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
6	Organisasi yang baik																					
	Persentase Penataan Jabatan sesuai peraturan yang berlaku				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Penataan ketatalaksana an yang baik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi terkait pelayanan publik dan tata laksana						4 OPD	5 OPD	6 OPD	7 OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase fasilitas keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase ansp tertata dengan baik				75%	78%	80%	80%	85%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase pengelolaan ketatausahaan pimpinan				85%	85%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH 2025-2029

2025 -
2029

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-							Realisasi Capaian Tahun ke-							Rasio Capaian Pada Tahun Ke-									
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	dengan baik																											
12	Persentase produk Hukum daerah yang disusun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
13	Persentase kasus yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	
15	Peningkatan Nilai LPPD				3,2090	3,2150	3,250	3,2290	3,2340	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
16	Persentase Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah						90%	92%	94%	95%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase peningkatan kerjasama daerah						90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	
18	Persentase peningkatan						90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH 2025-2029

2025 -
2029

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke -							Realisasi Capaian Tahun ke-							Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	fasilitasi penelapan dan penegasan batas administrasi kecamatan																						
19	Nilai Kematangan Inovasi Selda						100	100	100	100	80%	80%	80%	80%	80%		100%	100%	100%	100%	100%		
20	Kesetatan BUMD						AAA	AAA	AAA	AAA	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		
21	Rata-rata Perubahan harga bahan pokok						0,05%-1,25%	0,05%-1,25%	0,05%-1,25%	0,05%-1,25%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		
22	Jumlah laporan Kinerja Program/kegiatan OPD Lingkup Ekonomi						4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		
23	Pemenuhan Kewajiban membayar zakat harta				96,40%	96,50%	96,60%	96,70%	96,80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		
24	Tingkat Partisipasi subuh berjemaah di Mesjid/mushalla				Rendah (≤10 Orang)	Rendah (≤10 Orang)	Sedang (11 s.d 20 Orang)	Sedang (11 s.d 20 Orang)	Tinggi (≥21 Orang)	Tinggi (≥21 Orang)	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		

Indikator yang belum tercapai antara lain :

1. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
2. Nilai OPD yang pengelolaan Pelayanan Publik baik

Faktornya antara lain :

1. Keterbatasannya Anggaran
2. Laporan yang diberikan tidak tepat waktu, sehingga menyulitkan untuk membuat laporan terkini sebagai bahan evaluasi pekerjaan.



TABEL 2.5

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH				
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021-2025				
NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
PERIODE RENSTRA 2021-2026				
1	2021	31.095.565.181	30.476.888.469	98,01
2	2022	33.925.717.877	32.181.238.464	94,85
3	2023	30.823.861.149	28.652.395.158	93,95
4	2024	29.067.728.420	27.502.777.913	94,61
5	2025	33.132.734.601	7.764.437.168	23,43
JUMLAH		158.045.607.228	126.577.737.172	80,97



TABEL 2.6

PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH																						
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021-2026																						
URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-							RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE						RATA-RATA PERTUMBUHAN		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	ANGGARAN	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
Selada	31.095.565.181	33.925.717.877	30.823.861.149	29.067.728.420	33.132.734.601	-	30.476.888.469	32.181.238.464	28.652.395.158	27.502.777.913	7.764.437.168	-	98,01	94,86	92,96	94,62	23,43	-	4,77	16,30		

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2025

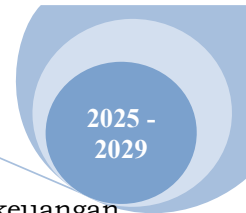
No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pesentase rata-rata pelayanan publik OPD yang bernilai baik	76 (Baik)	78 (Baik)	77,29 (Baik)	82,301 (Baik)	90 (Baik)
2	Persentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi (%)	85%	90%	90%	95%	95%
3	Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan (%)	80%	80%	80%	80%	80%
4	Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100	100	100	100	100
5	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	C	B	B	B	B
6	Nilai LPPD	3037	3130	3.009	32,090	32,30
7	Peringkat MTQ tingkat provinsi	7 besar	6 besar	6 besar	12 besar	12 besar
8	Persentase TPQ Aktif (%)	80	80	95	95	100
9	Indeks Kepuasan masyarakat	C	B	B	B	B
10	Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif (%)	22,30	65,62	95,00	95	100
11	Persentase potensi zakat yang dikelola BAZ (%)	70	75	97	91	100
12	Laju Inflasi	4,2	3,8	2,60	1,7	0,7

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati serta sesuai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah. Berdasarkan capaian kinerja jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah pada kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2025 sampai dengan 2029 dalam menjabarkan Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berakhlak;
3. Pesisir Selatan menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera;
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Untuk menjawab tantangan di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan



administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH****3.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah**

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program/Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Dalam hal kebijakan pada Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 sebesar 77,12 katagori BB = Sangat Baik.
2. Belum maksimalnya evaluasi produk hukum daerah
3. Peraturan yang ada belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat
4. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah
5. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat kabupaten.
6. Masih kurangnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah;
7. Masih rendahnya Budaya Kerja;
8. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pelayanan;
9. Belum optimalnya pengawasan, legislasi dan perencanaan penganggaran yang efisien;
10. Belum optimalnya penyusunan dan pengawasan produk hukum di daerah yang aspiratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beerlaku;
11. Belum optimalnya pembinaah kewilayahan dan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan sampai ketingkat nagari.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat Perangkat Daerah.
2. Terdapatnya Kegiatan yang tumpang tindih (*overlapping*).

3. Pemahaman Perangkat Daerah terhadap Pengadaan Barang dan Jasa masih rendah.
4. Masih lemahnya perencanaan program dan kegiatan pada masing-masing unit kerja.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut:

1. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya
2. Belum optimalnya penataan kelembagaan sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja
3. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Dalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan Sekretariat Daerah dipengaruhi oleh Faktor-faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Kuantitas, Kualitas dan kapasitas aparat belum sepenuhnya memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan beban kerja yang makin meningkat.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.
2. Sering terlambatnya petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat sehingga menimbulkan keraguan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

“PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN”

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Maju	:	Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor, termasuk Infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan teknologi.
Tumbuh	:	Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekedar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Berkelanjutan	:	Menegaskan bahwa prinsip pembangunan yang tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan menyeimbangkan tiga pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, agar daerah dapat berkembang dengan tetap menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sumber daya yang dimiliki.

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk **MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN** dilaksanakan melalui 5 (Lima) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berakhlak

3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2021-2026 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMD Nasional Tahun 2025-2029 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima.
2. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan.
3. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
5. peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan.
6. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ABS-SBK.
7. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing.
8. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.
9. Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Rumusan Misi Sekretariat Daerah adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah.

Indikator tujuan : Nilai EPPD

Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah
Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja, dan Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai Target
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah
Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dan Nilai Kematangan Inovasi Setda

Berdasarkan Visi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dan untuk memenuhi harapan dari misi di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan sinkronisasi isu-isu strategis yang terjadi di ditingkat nasional dan dan propinsi untuk dijadikan bahan acuan.

Sinkronisasi isu-isu strategis tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut :

TABEL 3.1
SINKRONISASI ISU STRATEGIS NASIONAL, PROPINSI SUMATERA BARAT DAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Propinsi Sumatera Barat	Isu Strategis Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan
1.	Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan: transformasi structural berjalan, produktifitas tenaga kerja meningkat, iklim investasi kondusif dan GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055	Penetapan penegasan batas dalam bentuk Permendagri belum tuntas	Pembangunan Manusia:
2	Sejahtera dapat diwujudkan dengan: kualitas hidup meningkat, Perilaku disiplin dan beradab, SDM berkualitas dan berdaya saing, dan indeks kebahagiaan meningkat	Regulasi dan pedoman kerja sama baru terbit, sehingga belum optimalnya pemahaman aparatatur/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.	Pembangunan ekonomi:
3	Adil dapat diwujudkan dengan: ketimpangan menurun dan redistribusi berjalan baik	Tidak tepat waktunya penyampaian administrasi dari Kab/Kota	Pembangunan kewilayahan
4	Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan: memperhatikan daya dukung dan daya tampung (<i>Low Carbon Development</i>) dan selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional	Aparat pemerintah daerah khususnya aparat kabupaten/kota yang belum memahami kebijakan SPM secara benar.	Pembangunan Infrastruktur
5		Pendataan sasaran penerima SPM belum optimal	Pembangunan Polhukamhan:
6		Proses pengkajian dan pembahasan membutuhkan waktu	
7		Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	
8		Terdapatnya Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan belum sinkron satu sama lain	

No.	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Propinsi Sumatera Barat	Isu Strategis Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan
9		Ketidakjelasan pemahaman hak oleh masyarakat dan pemerintah	
10		1. Masih rendahnya SDM Lembaga Mental Spiritual 2. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana Lembaga Mental Spiritual	
11		Kurangnya koordinasi Kebijakan Kabupaten/Kota	
12		Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang- undangan	
13		Belum Selarasnya Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	
14		Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi ditingkat Provinsi dan Kab/Kota	
15		Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM Pengadaan terkait Pengadaan Barang dan Jasa	
16		Belum optimalnya tatakelola terkait pengadaan barang dan jasa	
17		Belum Optimalnya modernisasi pengadaan barang dan jasa melalui Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
18		Regulasi tentang pengendalian administrasi pembangunan yang masih belum jelas	
19		Dinamika perubahan regulasi terkait penataan kelembagaan yang sangat dinamis	
20		Belum meratanya pemahaman kepala perangkat daerah dan aparatur pengelola	

No.	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Propinsi Sumatera Barat	Isu Strategis Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan
		SAKIP di masing masing perangkat daerah terkait implementasi SAKIP	
21		Belum optimalnya dukungan pimpinan daerah dalam pelaksanaan RB	
22		Masih kurangnya pemahaman aparatur pelayanan dalam pengembangan pelayanan	
23		Belum optimalnya penyusunan Peta Proses Bisnis dan penerapan standar operasional	
24		Masih rendah nya ASN yang memiliki kemampuan dalam memberikan layanan yang profesional dan maksimal	
25		Masalah pelayanan pimpinan (sekda, satf ahli dan asisten) serta tamu rumah tangga KDH dan WKDH	
26		Pelayanan administrasi keuangan skeretariat daerah	
27		Masih rendah nya ASN yang memiliki kemampuan dalam memberikan layanan yang profesional dan maksimal	
28		Masih rendahnya ASN yang memiliki kemampuan dalam memberikan layanan yang profesional dan maksimal terhadap kepegawaian lingkup	
29		Masih rendahnya ASN yang memiliki kemampuan dalam memberikan layanan yang professional dan maksimal terhadap pimpinan dan tamu pimpinan (KDH dan WKDH)	
30		Belum maksimalnya	

No.	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Propinsi Sumatera Barat	Isu Strategis Sekretariat Daerah Kab. Pesisir Selatan
		pengelolaan dan monitoring terhadap media massa dalam pendokumentasian kegiatan pimpinan	

Isu Strategis Nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2025 – 2029

Tujuan Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Tema pembangunan yang dipilih untuk RPJMN 2025 – 2029 adalah “**Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**”. Tema ini diuraikan sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan system pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agro maritime industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hokum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Beberapa permasalahan dan isu- isu strategis Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- 1 Penetapan penegasan batas dalam bentuk Permendagri belum tuntas
- 2 Regulasi dan pedoman kerja sama baru terbit, sehingga belum optimalnya pemahaman aparat/Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.
- 3 Tidak tepat waktunya penyampaian adminustrasi dari Kab/Kota

- 4 Aparat pemerintah daerah khususnya aparat kabupaten/kota yang belum memahami kebijakan SPM secara benar.
- 5 Pendataan sasaran penerima SPM belum optimal
- 6 Proses pengkajian dan pembahasan membutuhkan waktu
- 7 Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- 8 Terdapatnya Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan belum sinkron satu sama lain
- 9 Ketidakjelasan pemahaman hak oleh masyarakat dan pemerintah
- 10
 1. Masih rendahnya SDM Lembaga Mental Spiritual
 2. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana Lembaga Mental Spiritual
- 11 Kurangnya koordinasi Kebijakan Kabupaten/Kota
- 12 Belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang- undangan
- 13 Belum Selarasnya Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat
- 14 Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi ditingkat Provinsi dan Kab/Kota
- 15 Belum memadainya kuantitas dan kualitas SDM Pengadaan terkait Pengadaan Barang dan Jasa
- 16 Belum optimalnya tatakelola terkait pengadaan barang dan jasa
- 17 Belum Optimalnya modernisasi pengadaan barang dan jasa melalui Pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
- 18 Regulasi tentang pengendalian administrasi pembangunan yang masih belum jelas
- 19 Dinamika perubahan regulasi terkait penataan kelembagaan yang sangat dinamis
- 20 Belum meratanya pemahaman kepala perangkat daerah dan aparatur pengelola SAKIP di masing masing perangkat daerah terkait implementasi SAKIP
- 21 Belum optimalnya dukungan pimpinan daerah dalam pelaksanaan RB
- 22 Masih kurangnya pemahaman aparatur pelayanan dalam pengembangan pelayanan
- 23 Belum optimalnya penyusunan Peta Proses Bisnis dan penerapan standar operasional
- 24 Masih rendah nya ASN yang memiliki kemampuan dalam memberikan layanan yang profesional dan maksimal
- 25 Masalah pelayanan pimpinan (sekda, satf ahli dan asisten) serta tamu rumah tangga KDH dan WKDH
- 26 Pelayanan administrasi keuangan skeretariat daerah
- 27 Masih rendah nya ASN yang memiliki kemampuan dalam memberikan layanan yang profesional dan maksimal

- 28 Masih rendahnya ASN yang memiliki kemampuan dalam memberikan layanan yang profesional dan maksimal terhadap kepegawaian lingkup
- 29 Masih rendahnya ASN yang memiliki kemampuan dalam memberikan layanan yang profesional dan maksimal terhadap pimpinan dan tamu pimpinan (KDH dan WKDH)
- 30 Belum maksimalnya pengelolaan dan monitoring terhadap media massa dalam pendokumentasian kegiatan pimpinan

Isu strategis dalam RPJMD teknokratik Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
 - a. Pelayanan Dasar
 - b. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi:
 - a. Pangan
 - b. Energi
 - c. Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital
 - d. Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
3. Pembangunan kewilayahan:
 - a. Sentra Pertumbuhan
 - b. Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
4. Pembangunan Infrastruktur:
 - a. Transportasi
 - b. Telekomunikasi
 - c. Sumber Daya Air, Perumahan dan Pemukiman
5. Pembangunan Polhukkamhan:
 - a. Hukum dan Regulasi
 - b. Hankam
 - c. Politik

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai Perangkat Daerah yang fungsi utamanya adalah fungsi koordinasi maka pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah secara teknis tidak berkaitan langsung dengan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup. Mengingat isu-isu permasalahan lingkungan hidup strategis di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan analisa data dan informasi di Kabupaten Pesisir Selatan, dirumuskan isu-isu strategis sebagai permasalahan utama yang sedang dan akan dihadapi lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimasa mendatang.

3.5 Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review Renstra Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 serta permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai visi-misi Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Kelembagaan yang belum optimal, efektif dan efisien.
2. Perlunya penyempurnaan SPM dan SOP.
3. Belum optimalnya penyusunan dan pengawasan produk hukum di daerah yang aspiratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beerlaku.
4. Kompetensi SDM masih rendah.
5. Perlunya Peningkatan sarana dan prasarana beroritasi pada Teknologi Informasi.
6. Belum optimalnya penerapan *Reward* dan *Punishment* memotivasi aparatur dalam meningkatkan kinerjanya.
7. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
8. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
9. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
10. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah.

Implikasi isu-isu strategis tersebut terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

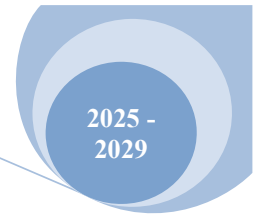
1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Penerapan kaidah *good governance* dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
2. Penyusunan regulasi dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pelayanan pemerintahan sampai ketingkat nagari.
3. Penerapan kebijakan urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap permasalahan daerah.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan.
5. Penerapan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.
6. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
7. Peningkatan sinergitas dalam pelaksanaan tugas administrasi dan umum.
8. Peningkatan kinerja pemerintahan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
9. Peningkatan pelayanan pelaksanaan tugas aparatur dengan pembinaan teknis dan administrasi bagi aparatur.
10. Peningkatan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan APBD.
11. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan.



12. Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal.
13. Peningkatan koordinasi internal Perangkat Daerah untuk peningkatan kinerja yang saling bersinergi.
14. Peningkatan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah melalui unjuk saran dan pertimbangan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN****4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN 2025 – 2029

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah		Nilai EPPD	Nilai	2,625	2,700	2,800	2,900	3,000	3,100
			Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	11,50	11,80	12,00	12,20	12,40	12,60
				Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai Target	Persentase	98%	98%	98%	98%	98%	98%
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Nilai	80 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	85 (A)
				Nilai Kematangan Inovasi Setda	Nilai	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk melaksanakan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN			
MISI I : Mewujudkan Pesisir Selatan yang Profesional dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatkan Kualitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sampai ke pemerintahan terendah dengan meningkatkan kompetensi penyelenggara pemerintahan	Menyediakan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dan penilaian Reformasi Birokrasi Pemerintah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Penerapan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik Pemerintah Daerah

BAB VI**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH SERTA PENDANAAN****6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagunya.**

Peran strategis Kabupaten Pesisir Selatan menuntut adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun nasional. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: *reengineering*, *revitalisasi*, *restrukturisasi* birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan prosedur yang menghambat investasi. Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah pada periode 2025-2029.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Reviu rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah periode tahun 2025–2029 terbagi pada 10 (Sepuluh) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

A. Visi : Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan

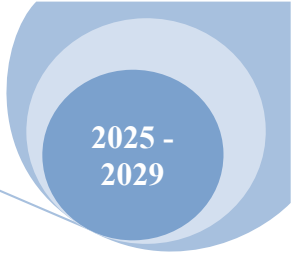
Tujuan		Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas				
1.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah	1.1.1.Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah	- Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan	Meningkatkan Kualitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sampai ke pemerintahan terendah dengan meningkatkan kompetensi penyelenggara pemerintahan
			- Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai Target	
		1.1.2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	- Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah
			- Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah	

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

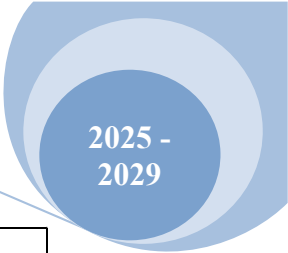
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab	
					Tahun 1 (2025)		Tahun 2 (2026)		Tahun 3 (2027)		Tahun 4 (2028)		Tahun 5 (2029)		Tahun 6 (2030)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah				Nilai EPPD	2,625		2,700		2,800		2,900		3,000		3,100		3,100			
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah			Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	11,60		11,80		12,00		12,20		12,40		12,60		12,60			
				Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai target	98%		98%		98%		98%		98%		98%		98%			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah			Nilai AKIP Sekretariat Daerah	77,12 (BB)		80,00(A)		81,00(A)		82,00(A)		83,00(A)		84,00(A)		84,00(A)			
				Nilai Kematangan Inovasi Setda	90		100		100		100		100		100		100			
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
		4 01	SEKRETARIAT DAERAH																	
		4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	29.345.437.038	100%	28.424.627.976	100%	28.869.718.408	100%	29.278.892.958	100%	29.573.892.958	100%	33.252.943.008	100%	32.884.627.976	SEKRETARIAT DAERAH	
				Nilai Komponen Pelaporan Kinerja terhadap evaluasi AKIP	11,60		11,80		12,00		12,20		12,40		12,60		12,60			
		4 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	100%	120.509.250	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	140.000.000	100%	145.000.000	100%	145.000.000		
		4 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	120.509.250	4 Dokumen	125.000.000	4 Dokumen	130.000.000	4 Dokumen	135.000.000	4 Dokumen	140.000.000	4 Dokumen	145.000.000	4 Dokumen	145.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
		4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	100%	14.770.650.898	100%	14.815.000.000	100%	14.870.000.000	100%	14.885.000.000	100%	14.900.000.000	100%	14.915.000.000	100%	14.915.000.000		
		4 01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/Bulan	14.357.953.402	97 Orang	14.400.000.000	97 Orang	14.450.000.000	97 Orang	14.460.000.000	97 Orang	14.470.000.000	97 Orang	14.480.000.000	97 Orang	14.480.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
		4 01 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
		4 01 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	377.697.496	12 Laporan	380.000.000	12 Laporan	385.000.000	12 Laporan	390.000.000	12 Laporan	395.000.000	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
		4 01 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	100%	52.733.279	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000		
		4 01 01 2,03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	52.733.279	4 Laporan	55.000.000	4 Laporan	60.000.000	4 Laporan	65.000.000	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	75.000.000	4 Laporan	75.000.000	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	
		4 01 01 2,05	Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	10%	100.000.000	20%	100.000.000	30%	100.000.000	40%	100.000.000	50%	100.000.000	60%	100.000.000	70%	100.000.000		
		4 01 01 2,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	10 Orang	100.000.000	BAGIAN UMUM	
		4 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	100%	1.296.649.466	100%	1.621.934.830	100%	1.731.934.830	100%	1.821.934.830	100%	1.951.934.830	100%	2.071.934.830	100%	2.071.934.830		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab	
					Tahun 1 (2025)		Tahun 2 (2026)		Tahun 3 (2027)		Tahun 4 (2028)		Tahun 5 (2029)		Tahun 6 (2030)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4 01 02 2,01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	26.170.850	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	BAGIAN TAPEM DAN KERJASAMA	
		4 01 02 2,01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	183.118.692	3 Dokumen	185.000.000	3 Dokumen	190.000.000	3 Dokumen	195.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	205.000.000	3 Dokumen	205.000.000	BAGIAN TAPEM DAN KERJASAMA	
		4 01 02 2,02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	90%	2.955.804.158	90%	3.335.037.923	90%	3.575.037.923	90%	3.695.037.923	90%	3.695.037.923	90%	3.895.037.923	90%	3.945.037.923		
		4 01 02 2,02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	1.086.422.955	1	1.256.000.000	1	1.356.000.000	1	1.386.000.000	1	1.396.000.000	1	1.486.000.000	1	1.486.000.000	BAGIAN KESRA	
		4 01 02 2,02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	35	1.316.343.280	38	1.426.000.000	40	1.526.000.000	41	1.586.000.000	43	1.566.000.000	45	1.686.000.000	46	1.716.000.000	BAGIAN KESRA	
		4 01 02 2,02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	553.037.923	3	653.037.923	3	693.037.923	3	723.037.923	3	733.037.923	3	723.037.923	3	743.037.923	BAGIAN KESRA	
		4 01 02 2,03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Daerah	85%	279.176.375	90%	380.000.000	90%	450.000.000	90%	510.000.000	90%	560.000.000	90%	640.000.000	90%	670.000.000		
				Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum	10%		15%		19%		22%		25%		28%		28%			
				Persentase Produk Hukum Daerah yang dihasilkan																
		4 01 02 2,03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	119.650.875	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	150.000.000	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	180.000.000	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	200.000.000	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	220.000.000	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	250.000.000	5 Perda, 25 Perbup dan 300 Sk	260.000.000	BAGIAN HUKUM	
		4 01 02 2,03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	124.525.500	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	180.000.000	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	200.000.000	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	210.000.000	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	220.000.000	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	250.000.000	3 Kasus, 2 Penyuluhan Hukum Nagari Sadar Hukum	260.000.000	BAGIAN HUKUM	
		4 01 02 2,03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	20 Buku LD dan 5 Buku BD	35.000.000	50 Buku LD dan 5 Buku BD	50.000.000	50 Buku LD dan 5 Buku BD	70.000.000	50 Buku LD dan 5 Buku BD	100.000.000	50 Buku LD dan 5 Buku BD	120.000.000	50 Buku LD dan 5 Buku BD	140.000.000	50 Buku LD dan 5 Buku BD	150.000.000	BAGIAN HUKUM	
		4 01 02 2,04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Efektifitas Kerja Sama Daerah	100%	39.813.600	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000		
				Persentase Kerjasama wajib yang dilaksanakan	50%		52%		54%		56%		58%		60%		60%			
		4 01 02 2,04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	25 Dokumen	39.813.600	27 Dokumen	45.000.000	29 Dokumen	50.000.000	31 Dokumen	55.000.000	33 Dokumen	60.000.000	35 Dokumen	65.000.000	35 Dokumen	65.000.000	BAGIAN TAPEM DAN KERJASAMA	
		4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	75%	917.088.230	80%	1.396.921.150	82%	1.668.920.550	85%	1.621.920.550	87%	1.738.920.550	90%	1.865.920.550	90%	2.005.920.550	SEKRETARIAT DAERAH	
				Tingkat Kematangan UKPBJ	40 / proaktif		40 / proaktif		40 / proaktif		40 / proaktif		40 / proaktif		40 / proaktif		40 / proaktif			
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	79,05		80		81		82		83		84		84			
		4 01 03 2,01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	75%	144.219.458	80%	265.000.000	82%	430.000.000	85%	305.000.000	87%	360.000.000	90%	390.000.000	90%	390.000.000		
				Total Kredit/PDRB (%)	19,81%		21%		22%		23%		24%		25,15%		25,15%			
				Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	6,44		9,44		12,44		15,44		18,44		20,46		20,46			
				Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi (Rupiah)	567119		636327		736327		836327		936327		1136327		1136327			
				Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0,43		0,45		0,47		0,49		0,50		0,52		0,52			
				Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3,86		3,95		4,10		4,25		4,40		4,50		4,50			

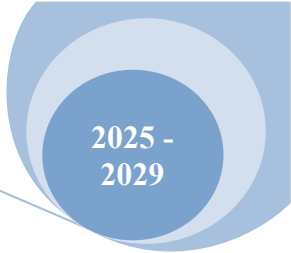
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Bagian Penanggungjawab	
					Tahun 1 (2025)		Tahun 2 (2026)		Tahun 3 (2027)		Tahun 4 (2028)		Tahun 5 (2029)		Tahun 6 (2030)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4 01 03 2,01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Ranperda Pendirian BUMD dari Mendagri	58.264.992	1 Peraturan Daerah tentang pendirian BUMD	100.000.000	1 Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, 2 Data Kebijakan Dokumen yang diolah	250.000.000	2 Dokumen data kebijakan BLUD dan BUMD yang diolah	120.000.000	2 Dokumen data kebijakan BLUD dan BUMD yang diolah	150.000.000	2 Dokumen data kebijakan BLUD dan BUMD yang diolah	170.000.000	2 Dokumen data kebijakan BLUD dan BUMD yang diolah	170.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
		4 01 03 2,01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	41.954.466	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	80.000.000	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 1	85.000.000	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 2	90.000.000	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 2	105.000.000	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 2	110.000.000	Pengendalian Inflasi Daerah 2,5, % ± 2	110.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
		4 01 03 2,01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	44.000.000	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	85.000.000	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	95.000.000	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	95.000.000	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	105.000.000	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	110.000.000	Data dan Informasi Kebijakan ekonomi Mikro yang tersedia	110.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
		4 01 03 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Efektifitas kebijakan Administrasi Pembangunan	75%	213.000.000	80%	250.000.000	82%	262.000.000	85%	275.000.000	87%	288.000.000	90%	300.000.000	90%	310.000.000		
		4 01 03 2,02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	0	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		4 01 03 2,02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 kali	145.000.000	6 kali	150.000.000	6 kali	155.000.000	6 kali	160.000.000	6 kali	165.000.000	6 kali	170.000.000	6 kali	175.000.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		4 01 03 2,02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	13 Laporan	68.000.000	13 Laporan	70.000.000	13 Laporan	72.000.000	13 Laporan	75.000.000	13 Laporan	78.000.000	13 Laporan	80.000.000	13 Laporan	85.000.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		4 01 03 2,03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	40/proaktif (sudah diangka maksimal, dan dipertahankan)	534.812.720	40	746.921.150	40	836.920.550	40	896.920.550	40	940.920.550	40	1.020.920.550	40	1.150.920.550		
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	79,04%		79,05%		80%		81%		82%		83%		84%			
		4 01 03 2,03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen	48.813.400	2 Dokumen	100.131.600	2 Dokumen	120.131.000	2 Dokumen	150.131.000	2 Dokumen	170.131.000	2 Dokumen	200.131.000	2 Dokumen	250.131.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4 01 03 2,03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	475.661.970	1 Dokumen	546.192.150	1 Dokumen	596.192.150	1 Dokumen	596.192.150	1 Dokumen	600.192.150	1 Dokumen	620.192.150	1 Dokumen	650.192.150	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4 01 03 2,03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150 orang	10.337.350	150 orang	100.597.400	150 orang	120.597.400	150 orang	150.597.400	150 orang	170.597.400	150 orang	200.597.400	150 orang	250.597.400	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		4 01 03 2,04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam	100%	25.056.052	100%	135.000.000	100%	140.000.000	100%	145.000.000	100%	150.000.000	100%	155.000.000	100%	155.000.000		
		4 01 03 2,04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	25.056.052	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	55.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
		4 01 03 2,04 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
		4 01 03 2,04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
			JUMLAH			33.776.598.331		33.831.587.049		34.878.676.881		35.440.851.431		35.922.851.431		40.028.901.481		39.880.586.449		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	target	Rp.000	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan															
4	01		SEKRETARIAT DAERAH				38.276.741		42.104.415		46.314.856		50.946.342		56.040.976		61.645.073	
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	29.195.437.038	100%	27.774.627.976	100%	28.219.718.408	100%	28.628.892.958	100%	28.923.892.958	100%	33.002.943.008	
				Nilai Komponen Pelaporan Kinerja terhadap evaluasi AKIP	10,97	11,60		11,80		12,00		12,20		12,40		12,60		
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektifitas Kerjasama Daerah	100%	100%	3.514.073.063	100%	4.010.037.923	100%	4.340.037.923	100%	4.540.037.923	100%	4.610.037.923	100%	4.910.037.923	
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	75%	75%	917.088.230	80%	1.266.921.150	82%	1.533.920.550	85%	1.481.920.550	87%	1.593.920.550	90%	1.715.920.550	



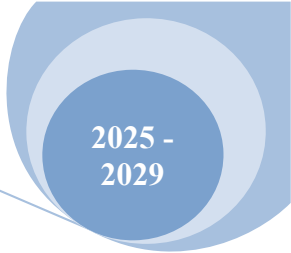
				Tingkat Kematangan UKPBJ	40 / proaktif	40 / proaktif		40 / proaktif		40 / proaktif		40 / proaktif		40 / proaktif		40 / proaktif	
				Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	79,05	79,05		80		81		82		83		84	
			TOTAL				33.626.598.331		33.051.587.049		34.093.676.881		34.650.851.431		35.127.851.431		39.628.901.481



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

TABEL 7.1
TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2025-2029
MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH

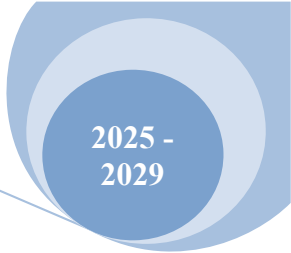
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	BASELINE 2024	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang efisien, akuntabel dan berdaya saing melalui urusan Sekretariat Daerah		Nilai EPPD	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	1,865	2,625	2,700	2,800	2,900	3,000	3,100	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	11,40	11,50	11,80	12,00	12,20	12,40	12,60	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
			Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai Target	Jumlah Persentase Capaian Kinerja OPD yg mencapai target X 100% Jumlah OPD	97,45%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat	77,12 (BB)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	85 (A)	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
			Nilai Kematangan Inovasi Setda	KOD = $\frac{TNPD}{JPD}$ KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah	90	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah



TABEL 7.2
TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029
MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	Kondisi Kinerja pada Awal Tahun RPJMD	TARGET						Komdisi Kerja Pada Akhir RPJMD	OPD Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
A	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Nilai EPPD	1,865	2,625	2,700	2,800	2,900	3,000	3,100	3,100	Sekretariat Daerah
2	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
3	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	75,53%	77,5%	80%	80%	82%	85%	85%	85%	Sekretariat Daerah
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	36,34%	38%	40%	42%	45%	45%	50%	50%	Sekretariat Daerah
5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-6,14%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Sekretariat Daerah



B	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
1	Tingkat Inflasi	2.00-3.00	2.80-3.60	2.71-3.58	2.61-3.53	2.52-3.49	2.42-3.47	2.33-3.43	2.33-3.43	Sekretariat Daerah
2	Konsumsi Listrik per Kapita	386,86	474,0	518,8	563,6	608,4	653,2	698,0	698,0	Sekretariat Daerah
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	69.76-71.00	70.01-71.01	70.23-71.21	70.45-71.41	70.66-71.61	70.88-71.81	71.10-72.01	71.10-72.01	Sekretariat Daerah
4	Indeks Reformasi Birokrasi	79,48	80,1	80,5	81,0	81,5	82	82,5	82,5	Sekretariat Daerah
5	Nilai SAKIP	68,94	70,1	71	75	80,1	80,3	80,4	80,4	Sekretariat Daerah
6	Indeks Pelayanan Publik	4,40	4,46	4,47	4,51	4,54	4,56	4,59	4,59	Sekretariat Daerah

BAB VIII**PENUTUP**

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk rencana strategis Sekretariat Daerah merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Visi Sekretariat Daerah sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan tahun 2029, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Dinas/Badan/lembaga Perangkat Daerah. Rencana strategis Sekretariat Daerah akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa hasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2029 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Painan,**2025****SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN****MAWARDI ROSKA, S.IP
Pembina Utama Madya – IV/d
NIP. 19670907 198902 1 001**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ESELON II SEKRETARIAT DAERAH

- 1
- Nilai EPPD
- 2
- Nilai SAKIP Pemerintah Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja
- 3
- Persentase Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang mencapai Target
- 4
- Nilai AKIP Sekretariat Daerah
- 5
- Nilai Kematangan Inovasi Setda

BASELINE	TARGET						BAGIAN TERKAIT	FORMULASI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1,865	2,625	2,700	2,800	2,900	3,000	3,100	TAPEM	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri
11,40	11,60	11,80	12,00	12,20	12,40	12,60	ORGANISASI	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
97,45%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	ORGANISASI	Jumlah Persentase Capaian Kinerja OPD yg mencapai target X 100% Jumlah OPD
77,12 (BB)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	84 (A)	85 (A)	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitasp Setda oleh Inspektorat
90	100	100	100	100	100	100	KEUANGAN	Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA ESELON III SEKRETARIAT DAERAH

- 1
- Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Daerah
- 2
- Persentase Nagari Binaan Sadar Hukum
- 3
- Persentase Produk Hukum Daerah yang dihasilkan
- 4
- Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
- 5
- Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
- 6
- Efektifitas Kerjasama Daerah

BASELINE	TARGET						BAGIAN TERKAIT	FORMULASI
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	HUKUM Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Daerah yang dilaksanakan X 100% Jumlah Total Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pemerintah Daerah
5%	10%	15%	19%	22%	25%	28%	HUKUM	Jumlah Nagari Binaan Sadar Hukum yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	HUKUM Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan X 100% Jumlah Total Produk Hukum Daerah
90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	KESRA Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat X 100% Jumlah Total Pelaksanaan Kebijakan Kesra
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TAPEM Laporan Wajib yang harus dilaksanakan (LPPD, LKPj dan Laporan SPM)
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	TAPEM Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain atau dengan Pihak Ketiga yang ditindaklanjuti

7	Persentase Kerjasama wajib yang dilaksanakan	45	50	52	54	56	58	60	TAPEM	$\frac{\text{Jumlah Kerja Sama yang ditandatangani}}{\text{Jumlah Target Kerja Sama}} \times 100\%$
8	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	79,04	79,05	80	81	82	83	84	PBJ	Hasil Penilaian LKPP RI
9	Tingkat Kematangan UKPBJ	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif	40 / proaktif	PBJ	Hasil Penilaian Kapabilitas UKPBJ dalam Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa oleh LKPP RI
10	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	70%	75%	80%	82%	85%	87%	90%	PEREKONOMIAN	$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan}}{\text{Jumlah Total Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan}} \times 100\%$
11	Total Kredit/PDRB (%)		19,81%	21,00%	22%	23%	24%	25,15%	PEREKONOMIAN	$\frac{\text{Total Kredit Per Kabupaten}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
12	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		6,44	9,44	12,44	15,44	18,44	20,46	PEREKONOMIAN	$\frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
13	Nilai Transaksi Saham Perkapita Per Provinsi (Rupiah)		567.119	636.327	736.327	836.327	936.327	1.136.327	PEREKONOMIAN	$\frac{\text{Nilai Transaksi Saham Per Kabupaten selama setahun}}{\text{Jumlah Penduduk Per Kabupaten}} \times 100\%$
14	Return on Aset (ROA) BUMD (%)		0,43	0,45	0,47	0,49	0,50	0,52	PEREKONOMIAN	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
15	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		3,86	3,95	4,10	4,25	4,40	4,50	PEREKONOMIAN	$IKAD_{it} = \left(\sum_{j=1}^{18} u_{it,j} \right) \times 10$
16	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	65%	75%	80%	82%	85%	87%	90%	PEMBANGUNAN	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Kebijakan Administrasi Pembangunan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
17	Nilai RB General	69,38	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00	ORGANISASI	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
18	Nilai Rata-rata SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja	12,14	12,35	12,56	12,77	12,98	13,19	13,40	ORGANISASI	$\frac{\text{Total Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Komponen Pelaporan Kinerja}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$

19	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	NA	37,1 (Tinggi)	37,1 (Tinggi)	37,5 (Tinggi)	37,5 (Tinggi)	37,5 (Tinggi)	38 (Tinggi)	ORGANISASI	KOD = <u>TNPD</u> JPD KOD = Kematangan Organisasi Daerah TNPD = Total Nilai Perangkat Daerah JPD = Jumlah Perangkat Daerah
20	Persentase Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memiliki IKM Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ORGANISASI	$\frac{\text{Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,49	91,52	91,55	91,58	91,61	91,64	91,67	ORGANISASI	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
22	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PROKOPIM	$\frac{\text{Jumlah Layanan Keprotokolan}}{\text{Jumlah keseluruhan layanan keprotokolan}} \times 100\%$
23	Persentase Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PROKOPIM	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Dokumentasi Pimpinan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah keseluruhan Kegiatan Dokumentasi Pimpinan}} \times 100\%$
24	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	UMUM	$\frac{\text{Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP terpenuhi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Layanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP}} \times 100\%$
25	Persentase Layanan Surat menyurat sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	UMUM	$\frac{\text{Jumlah Layanan Surat menyurat sesuai SOP terpenuhi}}{\text{Total Kebutuhan Layanan Surat menyurat sesuai SOP}} \times 100\%$
26	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	UMUM	$\frac{\text{Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP terpenuhi}}{\text{Total Kebutuhan Layanan Sarana dan Prasarana sesuai SOP}} \times 100\%$
27	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KEUANGAN	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yang lengkap}}{\text{Jumlah Total Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi}} \times 100\%$
28	Ketepatan waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	KEUANGAN	Ketepatan waktu Penyampaian Laporan sesuai Permintaan Instansi Terkait

INDIKATOR KINERJA DAERAH

	INDIKATOR KINERJA DAERAH	BASELINE						BAGIAN TERKAIT	FORMULASI
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Tingkat Inflasi	2.00-3.00	2.80-3.60	2.71-3.58	2.61-3.53	2.52-3.49	2.42-3.47	2.33-3.43	$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{I_{t+1} - I_t}{I_t} \times 100\%$
2	Konsumsi Listrik per Kapita	386,86	474,0	518,8	563,6	608,4	653,2	698,0	$KLpk = \frac{KLpda + KLnonpda}{P}$

3 Indeks Reformasi Birokrasi

79,48	80,1	80,5	81	81,5	82	82,5	ORGANISASI	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
68,94	70,1	71	75	80,1	80,3	80,4	ORGANISASI	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
4,40	4,46	4,47	4,51	4,54	4,56	4,59	ORGANISASI	Nilai Hasil Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

4 Nilai SAKIP

5 Indeks Pelayanan Publik